Keterpaduan dan Keberlanjutan Pengelolaan Sumberdaya Air di Indonesia

Marina Abriani Butudoka ¹⁾

¹⁾ Program Studi Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Sorong
Jln. Pendidikan No 27 Kota Sorong
Email : mabutu1984soq@gmail.com

I. Pendahuluan

Ada tiga fenomena penting yang perlu dicermati dalam kaitan dengan pengelolaan sumberdaya air di Indonesia. Pertama, adalah permintaan terhadap air dari berbagai sector kehidupan cenderung semakin meningkat. Perkembangan permukiman di wilayah perkotaan, perkembangan industri, pertambangan, dan peningkatan permintaan terhadap energi listrik telah meningkatkan permintaan terhadap air. Peningkatan permintaan ini pada sejumlah daerah telah menimbulkan “kelangkaan” sehingga timbul kompetisi dan konflik dalam pengalokasian terutama diantara penggunaan untuk pertanian (sebagai sector pengguna terbesar) dengan sector non pertanian.

Kedua, penurunan kondisi sumberdaya air itu sendiri. Peningkatan permintaan dan terjadinya kelangkaan air diikuti pula oleh penurunan kondisi sumberdaya air dalam bentuk kerusakan daerah tangkapan dan pencemaran air sehingga terjadi kekeringan dimusim kemarau dan banjir dimusim hujan.

Ketiga, “krisis” pengelolaan yang ditandai oleh “keidak mampuan” kerangka kebijakan, kerangka hukum, kerangka kelembagaan, dan kapasitas sumberdaya manusia, dalam menyikapi fenomena pertama dan kedua diatas.

Ketiga fenomena tersebut mengindikasikan semakin meningkatnya kompleksitas pengelolaan sumberdaya air sehingga diperlukan adanya keterpaduan dalam pengelolaan dan pembaharuan kebijakan. Dalam kaitan ini pemerintah Indonesia sudah melakukan upaya pembaharuan kebijakan pengelolaan sumberdaya air. Makalah ini mencoba menyalau aspek keterpaduan dalam kebijakan baru, terutama dalam rancangan undang-undang (RUU) sumberdaya air yang sudah dipersiapkan. Pada bagian awal dari makalah ini akan disajikan pengertian dan prinsip-prinsip pengelolaan terpadu sumberdaya air (integrated water resources management – IWRM) .

II. Pembahasan

1. Pengertian dan Prinsip-Prinsip Pengelolaan Sumberdaya Air Terpadu (IWRM)

Pengelolaan sumberdaya air secara terpadu adalah suatu proses yang mengedepankan pembangunan dan pengelolaan sumberdaya terkait lainnya secara terkoordinasi dalam rangka

memaksimalkan resultan ekonomi dan kesejahteraan sosial secara adil tanpa mengorbankan kelanjutan (sustainability) ekosistem yang vital.

Prinsip-prinsip pengelolaan air secara terpadu ini dikembangkan sebagai respon terhadap pola pengelolaan sumberdaya air yang diterapkan selama ini yang cenderung terpisah-pisah sehingga menimbulkan berbagai persoalan seperti banjir, intrusi air laut karena pengambilan air tanah yang berlebihan, pencemaran, dan sebagainya. Keterpaduan ini mencakup dua komponen besar, yaitu keterpaduan pada system alam dan keterpaduan pada sistem manusia.

Pada komponen system alam (natural system), setidaknya ada enam aspek keterpaduan yang diperlukan, yaitu:

- 1) Keterpaduan berbagai kepentingan yang berkaitan dengan air diantaranya daerah hulu dan hilir;
- 2) Keterpaduan diantara pengelolaan kuantitas dan kualitas;
- 3) Keterpaduan diantara pengelolaan air permukaan dan air bawah tanah;
- 4) Keterpaduan diantara penggunaan lahan dan pengelolaan air (berkaitan dengan siklus hidrologi);
- 5) Keterpaduan diantara pengelolaan “green water” (air yang digunakan untuk evapotranspirasi) dan “blue water” (air yang mengalir di sungai atau air di akuifer);
- 6) Keterpaduan diantara pengelolaan air tawar dengan pengelolaan daerah pantai.

Pada komponen system manusia (human system) setidaknya ada empat aspek keterpaduan yang diperlukan, yaitu:

- 1) Keterpaduan antara sector dalam pembuatan kebijakan nasional (cross-sectoral integration in national policy development). Kebijakan sumberdaya air perlulah terintegrasi baik dengan kebijakan pembangunan ekonomi, sosial, maupun kebijakan pembangunan sektoral. Sebaliknya kebijakan ekonomi dan social perlulah memperhitungkan implikasinya terhadap sumberdaya air;
- 2) Keterpaduan semua stakeholders dalam perencanaan dan pengambilan keputusan, Keterpaduan dalam aspek ini merupakan elemen kunci dalam menciptakan keseimbangan dan keberlanjutan penggunaan air. Realitasnya adalah bahwa masing-masing stakeholders mempunyai kepentingan yang berbeda dan sering bertentangan (konflik) satu sama lain;

- 3) Keterpaduan diantara pengelolaan air dan air limbah. Aspek penting disini adalah bagaimana air limbah bias menjadi penambahan yang bermanfaat terhadap aliran air atau suplai air. Tanpa pengelolaan yang terkoordinasi aliran air limbah akan mencemari air tawar dan mengurangi suplai efektif yang tersedia.

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan sumberdaya air secara terpadu (IWRM) ada tiga kriteria utama yang dijadikan acuan, yaitu:

- 1) Efisiensi ekonomi. Dengan meningkatnya kelangkaan air dan sumberdaya keuangan, dan sifat sumberdaya air yang tersedia secara terbatas dan mudah tercemar, serta semakin meningkatnya permintaan maka efisiensi ekonomi penggunaan air sudah harus menjadi perhatian;
- 2) Keadilan. Air adalah salah satu kebutuhan dasar kehidupan, oleh sebab itu maka semua orang perlu mempunyai akses terhadap air yang mencukupi baik secara kuantitas maupun kualitas untuk mempertahankan kehidupannya;
- 3) Keberlanjutan (sustainability) lingkungan dan ekologi. Penggunaan sumberdaya air haruslah dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak mengorbankan kepentingan generasi yang akan datang terhadap air.

Ketiga kriteria tersebut perlulah mendapat perhatian secara berimbang. Dalam kaitan ini maka ada beberapa elemen penting dan kerangka dan pendekatan IWRM, Yaitu:

- 1) Lingkungan yang memungkinkan (enabling environment) dalam bentuk kebijakan nasional, peraturan perundang-undangan, dan informasi tentang stakeholder pengelolaan sumberdaya air;
- 2) Peran kelembagaan (institutional roles) pemerintah dan stakeholders pada berbagai tingkatan;
- 3) Instrumen-instrumen pengelolaan (managemen instruments) untuk pengaturan yang efektif (seperti regulasi pada berbagai tingkatan dari pusat sampai kedaerah), untuk monitoring, dan untuk penegakan aturan yang memungkinkan pengambil keputusan untuk membuat pilihan diantara alternatif pilihan yang tersedia.

2. Kecenderungan dan Isu Pengelolaan Terpadu Sumberdaya Air di Indonesia

Ada beberapa kecenderungan dan isu pokok pengelolaan terpadu sumberdaya air perlu menjadi perhatian dalam kaitan dengan pengelolaan yang berkelanjutan, yaitu:

Pertama, tanggung jawab pengelolaan dan perlindungan sumberdaya air yang terbagi (fragmented) diantara berbagai instansi pemerintah. Masing-masingnya mempunyai prioritas sendiri dalam pengelolaan sumberdaya air. Isunya disini adalah membangun sebuah kerangka

koordinasi antar instansi pemerintah dan diatas itu diantara semua pihak yang berkepentingan (stakeholders).

Kedua, sebagian besar air (sekitar 85%) digunakan untuk irigasi dengan efisiensi pengaliran yang rendah (sekitar 40%). Disamping itu, secara ekonomi nilai air untuk penggunaan ini rendah. Ketika permintaan air dari sector lain semakin meningkat maka cenderung terjadi relokasi air dari kegiatan pertanian ke kegiatan non-pertanian. Disini timbul isu dan persoalan jaminan air bagi petani yang merupakan kelompok yang lemah dalam masyarakat.

Ketiga, pengelolaan sumberdaya air di Indonesia bias sisi penyediaan (supply) yang ditandai oleh perlakuan terhadap air sebagai sumberdaya yang ketersediaannya tidak terbatas, peran pemerintah yang dominan dalam penyediaan pelayanan air dengan beban biaya yang relative rendah (gratis sama sekali) terhadap pengguna, dan pendekatan kontruksi untuk menjawab kelangkaan supply dan kecenderungan penilaian efisiensi dari sudut pandang teknis. Isunya adalah bagaimana merubah orientasi pengelolaan dari sisi penyediaan (suplly) ke sisi permintaan (demand). Prinsip Pengelolaan pada strategi sisi permintaan menekankan pada mempengaruhi perilaku pengguna dalam memakai air dengan mengembangkan organisasi pengelolaan yang menagani kedua aspek tersebut secara bersamaan (tiodak hanay sisi penyediaan saja).

Keempat, organisasi pengelolaan belum berkembang untuk menjawab tantangan yang ada dan jika organisasi sudah ada otonomi organisasi ini masih rendah sehingga sebagian besar keputusan masih dibuat secara tersentralisasi. Isu penting dalam kaitan ini adalah keterlibatan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan berbagai aspek pengelolaan sumberdaya air.

Kelima, konservasi daerah tangkapan air dan isi keadilan dalm hubungan hulu dengan hilir. Konservasi daerah tangkapan air adalah salah satu aspek penting dalam pengelolaan sumberdaya air yang berkelanjutan. Tetapi, perhatian terhadap aspek konservasi ini kelihatannya belum cukup memadai yang ditandai dengan terjadinya kekeringan dan banjir. Disamping itu aspek keadilan distribusi manfaat dan biaya diantara masyarakat yang tinggal didaerah hulu yang diharapkan melakukan konservasi dan masyarakat di bagian hilir yang menikmati hasil kegiatan konservasi belum banyak mendapat perhatian.

Keenam, isu peningkatan kapasitas untuk melaksanakan pengelolaan sumberdaya air yang berkelanjutan. Pengelolaan yang bersifat sektoral selama ini juga diikuti dengan pengembangan kapasitas yang sifatnya sektoral. Pengelolaan sumberdaya air yang berkelanjutan mensyaratkan diaplikasikannya prinsip-prinsip pengelolaan terpadu

sumberdaya air. Aplikasi prinsip-prinsip pengelolaan terpadu sumberdaya air menghendaki pengetahuan dan ketrampilan teknis yang berbeda sama sekali dengan pengelolaan yang terfragmentasi dan sektoral. Oleh sebab itu upaya peningkatan kapasitas dalam kerangka pengelolaan terpadu merupakan salah satu elemen pokok pengelolaan sumberdaya air yang berkelanjutan.

3. Arah Pengelolaan Terpadu dan Berkelanjutan Sumberdaya Air di Indonesia

Dalam upaya merespon isu dan tantangan pengelolaan sumberdaya air tersebut pemerintah Indonesia sekarang sedang melaksanakan pembaharuan kebijakan pengelolaan sumberdaya air. Secara garis besarnya agenda yang tercakup dalam upaya pembaharuan kebijaksanaan ini, yaitu:

- (1) membentuk wadah nasional sumberdaya air (badan air nasional, atau dengan nama lainnya);
- (2) merumuskan kebijaksanaan sumberdaya air nasional;
- (3) menyesuaikan undang-undang dan peraturan pemerintah (termasuk peraturan daerah);
- (4) memperkuat sistem koordinasi kelembagaan sumberdaya air baik pada tingkat propinsi maupun pada tingkat wilayah sungai;
- (5) membentuk kerangka sistem informasi dan jaringan data sumberdaya air;
- (6) menyelenggarakan korporatisasi pengelolaan wilayah sungai;
- (7) mempersiapkan kerangka kerja untuk alokasi air yang adil dan efisien, dan mekanisme hak guna air untuk air permukaan dan air tanah;
- (8) membentuk kerangka peraturan yang efektif dan dapat dijalankan untuk pengendalian pencemaran air dan pengelolaan kualitas air;
- (9) merevisi kebijaksanaan, kelembagaan, dan peraturan untuk meningkatkan manajemen irigasi.

Beberapa tanggapan terhadap RUU Sumberdaya Air tersebut yang dibuat berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan sumberdaya air terpadu, kecenderungan dan isu pengelolaan sumberdaya air di Indonesia yaitu:

- (1) isu keterpaduan (Pasal 10 dan Pasal 59),
- (2) isu kuatnya pertarungan antar sector terutama yang menyangkut air tanah (Pasal 11 dan Pasal 12),
- (3) isu keadilan hulu dan hilir (Bab III dan Bab V),
- (4) isu polluters pay principle (Pasal 22, Ayat 3),
- (5) isu izin vs. hak guna (pakai dan usaha) (Pasal 43 dan Pasal 80),
- (6) isu jaminan air untuk petani (Pasal 47),

- (7) isu kelembagaan (lihat Pasal 62),
- (8) isu privatisasi pengelolaan dan penyediaan pelayanan (lihat Pasal 40 dan Pasal 46),
- (9) isu pemberdayaan (Bab IX dengan pasal-pasal nya),
- (10) isu konsep one river, one plan and one coordinated management (Pasal 86, Ayat 3) .

III. Penutup

Pengelolaan sumberdaya air secara terpadu adalah suatu proses yang mengedepankan pembangunan dan pengelolaan sumberdaya terkait lainnya secara terkoordinasi dalam rangka memaksimalkan jumlah ekonomi dan kesejahteraan sosial secara adil tanpa mengorbankan kelanjutan (sustainability) ekosistem yang vital. Keterpaduan antara beberapa komponen harus saling terkait dalam rangka mewujudkan pengelolaan sumberdaya air secara terpadu.

Daftar Pustaka

1. Helmi, (2003). Aspek Pengelolaan Terpadu Sumberdaya Air (Integrated Water Resources Management - IWRM) dalam Pebaharuan Kebijakan Menuju Pengelolaan Sumberdaya Air yang Berkelanjutan di Indonesia.
2. Hadad Nadia, (2003). Kebijakan Sektor Sumberdaya Air Indonesia.
3. Sigit Arif, (2001). Pembangunan Berkelanjutan dalam Pengelolaan Sumber Daya Air